



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2026 ini dapat tersusun. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2026 Dinas Sosial, Renja tahun 2026 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas. Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja tahun 2024 sampai dengan triwulan IV, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Sungai Raya,

2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag.,M.Pd
NIP. 196708081999031010

Daftar Isi

KATA PENGANTAR..... i

Daftar Isi 2

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL..... 7

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra
 Dinas Sosial 7

 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 33

 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 44

 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 72

 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 72

 3.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025..... 73

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 97

BAB V PENUTUP 102



Daftar Tabel

TABEL 2. 1.....14

TABEL 2. 2.....34

TABEL 2. 3.....43

TABEL 2. 4.....47

TABEL 3. 1.....78

TABEL 4. 1.....97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra SKPD, Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.

Renja Perangkat Daerah mengacu pada rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mengusung tema “Pemulihan dan Penanjakan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya”. Tema tersebut memiliki kata kunci penguatan SDM unggul dan pemulihan sosial ekonomi.

Selaras dengan mewujudkan SDM yang berdaya secara ekonomi, maka dalam urusan sosial erat kaitannya dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut sesuai dengan dengan amanat undang-undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 Tahun 2009 bahwa Dinas Sosial menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan perannya tersebut Dinas Sosial perlu mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai Mitra Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Penyediaan data yang akurat menjadi hal yang penting dan mendasar bagi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Selain itu pengembangan pelayanan Dalam Balai menjadi prioritas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Selain memprioritaskan



Pelayanan Dalam Balai, Dinas Sosial juga masih melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Luar Balai dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Restorasi Sosial.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukun penyusunan Renja, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
25. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 61)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial adalah untuk mengawali proses perencanaan penganggaran sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; bahwa Perangkat Daerah menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2026 adalah untuk memperjelas arah kebijakan dan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
3. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah



4. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. BAB V Penutup

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi dana Rp. 4.759.226.249,- Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu Rp 4.005.892.697,- terealisasi sebesar Rp **3.849.366.607,- dengan persentase sebesar 96,09%**

Dibagi dalam beberapa kegiatan/sub kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu Rp **47.058.974,-** dibagi kedalam 3 sub kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 24.770.308, terealisasi sebesar Rp 24.574.300,- **dengan persentase sebesar 99,21%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Rp 6.938.010,- terealisasi sebesar Rp 6.869.568,- **dengan persentase 99,01%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 15.350.656,- terealisasi sebesar Rp 12.854.998,- **dengan persentase 83,74%** telah terlaksana dengan baik
 - boo

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Rp 14.724.717,- dibagi kedalam 3 Sub Kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Rp 5.642.626,- terealisasi sebesar Rp **4.193.049,- dengan persentase 74,31%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Rp 3.260.528,- terealisasi sebesar Rp **3.198.002,- dengan persentase 98,08%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Rp 5.821.563,- terealisasi sebesar Rp **5.756.108,- dengan persentase 98,88%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Rp 9.061.509,- dibagi dalam 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Rp 3.043.928,- terealisasi sebesar Rp 2.907.972,- dengan persentase 95,53% telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Rp 3.019.948,- terealisasi sebesar Rp 2.886.920,- dengan persentase 95,60% telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Rp 2.997.633,- terealisasi sebesar Rp 2.919.157,- dengan persentase 97,38% telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Pagu Rp **147.101.188,-** dibagi dalam 5 Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Rp 3.073.990,- terealisasi sebesar Rp 3.052.500,- **dengan persentase 99,30%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu Rp 44.362.710,- terealisasi sebesar Rp 43.889.429,- **dengan persentase 98,93%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Pagu Rp 6.345.488,- terealisasi sebesar Rp 5.945.168,- **dengan persentase 93,69%** telah terlaksana dengan baik



- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu Rp 57.319.000,- terealisasi sebesar Rp 50.731.829,- **dengan persentase 88,51%** telah terlaksana dengan baik hanya saja tersisa anggaran dari lebih pagu anggaran, tetapi volume belanjanya sudah dilaksanakan dengan baik.
- Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan Pagu Rp 36.000.000,- terealisasi 100%
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Rp **198.000.000,-** dibagi kedalam 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Rp 198.150.000,- terealisasi sebesar Rp **198.000.000,- dengan persentase 99,92%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Rp **487.328.838,-** dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu Rp 41.904.000,- terealisasi sebesar Rp 41.827.500,- **dengan persentase 99,82%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu Rp 445.424.838,- terealisasi sebesar Rp 445.162.750,- **dengan persentase 99,94%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Rp **104.482.500,-** dibagi kedalam 5 Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu Rp 78.200.000,- terealisasi 100%
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu Rp 50.000.000,- terealisasi sebesar

Rp 49.955.072,- **dengan persentase 99,91%** telah terlaksana dengan baik

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu Rp 7.300.000,- terealisasi 100%
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan Rp 10.800.000,- terealisasi 100%
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Rp 7.320.000,- terealisasi 100%

Dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah memenuhi penyerapan realisasi anggaran sebesar 90% dan realisasi kinerja sebesar 96,09% hal ini hampir mencapai target sebesar 100%

2. Program Pemberdayaan Sosial dengan total Pagu Rp 12.538.113,-

Dibagi dalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :

- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 12.538.113,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 5.591.883,- terealisasi sebesar Rp 3.118.567,- dengan persentase 55,77% dikarenakan pada belanja perjalanan dinas hanya bisa mencairkan uang harian tanpa belanja transport disetiap kecamatannya.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 6.946.230,- terealisasi sebesar Rp 5.322.214,- dengan persentase 76,62% dikarenakan pada belanja perjalanan dinas hanya bisa mencairkan uang harian tanpa belanja transport disetiap kecamatannya.

Dari Program Pemberdayaan Sosial telah memenuhi penyerapan anggaran sebesar 67,32% dan realisasi kinerja sebesar 100%

Sub kegiatan hampir memenuhi target realisasi anggaran dan dapat dikatakan baik, Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya realisasi anggaran adalah waktu pelaksanaan perjalanan dinas tanpa terpenuhinya belanja transport di setiap kecamatan.

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan Pagu Rp 730.014,- didalam Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, untuk program dan kegiatan ini dapat direalisasikan baik dari segi anggaran maupun kinerja karena realisasinya tidak bisa di prediksi tergantung situasi dan kondisi di lapangan, di tahun 2024 terdapat 2 warga negara migran yang terlayani.
4. Program Rehabilitasi Sosial dengan Pagu Rp 522.012.259,-
Dibagi kedalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan Pagu Rp 505.249.794,- dibagi kedalam 3 Sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan Pagu Rp 9.271.999,- terealisasi sebesar Rp 7.780.369,- **dengan persentase 83,91%** dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan kurang tepat waktu dalam melaksanakan pencairan belanja barang
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Rp 124.462.569,- terealisasi sebesar Rp 113.493.415,- **dengan persentase 91,19%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Rp 371.515.226,- terealisasi sebesar Rp 313.014.320,- **dengan persentase 84,25%** dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan kurang tepat waktu dalam melaksanakan pencairan belanja barang
 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan Pagu Rp 16.762.465,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dengan Pagu Rp 14.362.465,- terealisasi

sebesar Rp 13.159.580,- **dengan persentase 91,62%** telah terlaksana dengan baik

- Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan Pagu Rp 2.400.000,- terealisasi 100%

Dari Program Rehabilitasi Sosial telah memenuhi penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp 86,18%, dan realisasi kinerja sebesar 100%. Angka ini sudah cukup baik, mengingat pada program Program Rehabilitasi Sosial kegiatan yang dilakukan bersifat accidentally dan tidak dapat di prediksi waktu pelaksanaannya.

5. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan Pagu Rp 165.850.448,-

Dibagi dalam :

- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 165.850.448,- dibagi dalam beberapa Sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 15.666.096,- terealisasi Rp 13.366.756,- dengan persentase 85,32% dikarenakan tidak terealisasinya Belanja Honorarium, ini tidak dapat terbayarkan dikarenakan kurangnya waktu pelaksanaan kegiatan untuk memberikan materi pada koordinasi pelaksanaan pendataan
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp 32.734.352,- terealisasi Rp 28.092.402,- dengan persentase 85,82% dikarenakan tidak terealisasinya Belanja Honorarium, ini tidak dapat terbayarkan dikarenakan kurangnya waktu pelaksanaan kegiatan untuk memberikan materi pada koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan pendataan fakir miskin
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pagu Rp 117.450.000,- terealisasi Rp 117.450.000,- terealisasi 100%

6. Program Penanganan Bencana dengan Pagu Rp 52.202.718,-

Dibagi kedalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota jumlah Pagu Rp 38.726.859,- dengan Sub Kegiatan



Penyediaan Makanan terealisasi sebesar Rp 34.984.326,- dengan persentase 90,34% telah terlaksana dengan baik

- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan Jumlah Pagu Rp 13.475.859,- dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana terealisasi sebesar Rp 13.093.420,- dengan persentase 97,16% telah terlaksana dengan baik.

Dari Program Penanganan Bencana telah memenuhi penyerapan realisasi anggaran sebesar 92,10% dan realisasi kinerja lebih dari 100%, telah terlaksana dengan baik



TABEL 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya s/d Tahun 2025**

Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2025-2026)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2024)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
							Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%



1	06	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kegiatan	4	2	2	2	100%	2	2	100%
1	06	02	2	03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	20	10	11	110%	20	20	100%
1	06	02	2	03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	40	23	10	12	120%	20	20	100%
1	06	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase	100	0	100	100	100%	100	100	100%



1	0 6	0 3	2	0 1		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	10	0	2	2	100%	5	5	100%
1	0 6	0 3	2	0 1	000 1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	0	2	2	100%	5	5	100%
1	0 6	0 4				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	90,8	100	100	100%	100	100	100%



1	06	04	2	01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase	100	81,6	100	100	100%	100	100	100%
1	06	04	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	59	30	50	167%	5	5	100%
1	06	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	66	0	0	0	0%	33	33	100%



1	0 6	0 4	2	0 1	000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhanKewenangan Kabupaten/Kota	Orang	66	121	15	23	153%	33	33	100%
1	0 6	0 4	2	0 1	000 4	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	0	0	0	0%	10	10	100%
1	0 6	0 4	2	0 1	000 5	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual,dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	112	50	128	256%	100	100	100%
1	0 6	0 4	2	0 1	000 6	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik,Mental,Spiritual,dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	0	0	0	0%	50	50	100%



						Pengemis dan Masyarakat										
1	06	04	2	01	0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	20	0	0	0	0%	10	10	100%
1	06	04	2	01	0008	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	0	0	0	0%	10	10	100%
1	06	04	2	01	0010	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	0	0	0	0%	10	10	100%



1	06	04	2	01	0011	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	0	0	0	0%	10	10	100%
1	06	04	2	01	0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	0	0	0	0%	10	10	100%
1	06	04	2	02		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%



1	06	04	2	02	0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	359	50	74	148%	50	50	100%
1	06	04	2	02	0010	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	200000	0	0	0%	50	50	100%
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase	100	0	100	100	100%	100	100	100%
1	06	05	2	01		Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk	Persentase	100	0	0	0	0%	100	100	100%



1	0 6	0 5	2	0 1	000 2	Sub Kegiatan Rujukan anak anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Orang	20	0	0	0	0%	10	10	100%
1	0 6	0 5	2	0 1	000 3	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Orang	20	0	0	0	0%	10	10	100%
1	0 6	0 5	2	0 2		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial	Persentase	100	0	59000	287.172	487%	100	100	100%
1	0 6	0 5	2	0 2	000 1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	20000	0	26000	287.172	1105%	10000	10000	100%
1	0 6	0 5	2	0 2	000 2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	42000	0	190000	28.528	15%	21000	21000	100%



1	06	05	2	02	0003	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	40000	0	43000	1.366	3%	20000	20000	100%
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	100	100	100	100	100%	100	100	100%
1	06	06	2	01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	412	644	40	119	298%	204	204	100%
1	06	06	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	412	644	40	119	298%	104	104	100%



1	06	06	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	4	2	2	2	100%	2	2	100%
1	06	06	2	02	0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	51	50	50	100%	50	50	100%
1	06					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	75	100	100	100	100%	75	75	100%
1	06	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	26	100	100	100	100%	13	13	100%
1	06	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	5	6	6	100%	3	3	100%



1	06	01	2	01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	1	1	100%
1	06	01	2	01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	1	1	100%
1	06	01	2	01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	1	1	100%
1	06	01	2	01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	2	0	0	0	0%	1	1	100%



1	06	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	1	5	5	100%	5	5	100%
1	06	01	2	01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	4	1	4	400%	1	1	100%
1	06	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	86	100	100	100	100%	43	43	100%
1	06	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	46	23	21	21	100%	23	23	100%
1	06	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2624	12	1312	1210	92%	1312	1312	100%



1	06	01	2	02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1	1	1	100%	1	1	100%
1	06	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	34	12	17	17	100%	17	17	100%
1	06	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	16	100	100	100	100%	8	8	100%
1	06	01	2	03	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	4	1	2	2	100%	2	2	100%



1	06	01	2	03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	1	1	1	100%	0	0	0%
1	06	01	2	03	0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	0	-	0	0%	1	1	100%
1	06	01	2	03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10	1	5	5	100%	5	5	100%
1	06	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang di Fasilitas	Dokumen	46	0	0	0	0%	23	23	100%
1	06	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	0	0	0	0%	1	1	100%
1	06	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	14	0	0	0	0%	7	7	100%



1	06	01	2	05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	46	0	0	0	0%	23	23	100%
1	06	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	24	92,57	100	100	100%	12	12	100%
1	06	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	1	1	1	100%	1	1	100%
1	06	01	2	06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	34	4	7	11	157%	17	17	100%
1	06	01	2	06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	10	3	1	5	500%	5	5	100%
1	06	01	2	06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	730	12	0	0	0%	365	365	100%



1	06	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	500	178	50	41	82%	250	250	100%
1	06	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	600	0	0	0	0%	300	300	100%
1	06	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	28	0	12	12	100%	14	14	100%
1	06	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	124	8	3	3	100%	55	55	100%
1	06	01	2	07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7	0	-	0	0%	0	0	0%
1	06	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	33	0	0	0	0%	10	10	100%



1	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	78	5	0	0	0%	9	9	100%
1	0	0	2	0	001	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6	3	3	3	100%	3	3	100%
1	0	0	2	0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	74	100	26	26	100%	37	37	100%
1	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	12	12	12	100%	24	24	100%
1	0	0	2	0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	26	12	14	14	100%	13	13	100%



1	06	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	104	24	26	26	100%	43	43	100%
1	06	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	7	1	1	100%	1	1	100%
1	06	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	1	2	2	100%	11	11	100%
1	06	01	2	09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	33	0	0	0	0%	10	10	100%
1	06	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	6	10	10	100%	15	15	100%



1	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	1	1	1	100%	1	1	100%
6	1	9	8													

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase capaian program prioritas Kabupaten Kubu Raya. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Kubu Raya Dalam Angka, Profil Daerah, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja SKPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya seperti pada table 2.2 berikut ini:



TABEL 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	151	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
2	Jumlah Data Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	



3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
4	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang dijangkau	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	151	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
5	Jumlah kendaraan roda empat yang diakses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	



6	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang menerima paket pemakanan sesuai standar gizi	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
7	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
8	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	



9	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
10	Jumlah Alat Bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
11	Jumlah Paket Perbekalan kesehatan yang tersedia	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	



12	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan Kesehatan	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
13	Jumlah Tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
14	Jumlah Pekerja sosial/TKSK/dan atau Relawan Sosial yang disediakan	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	



15	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standard dikeluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
17	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	



18	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
19	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
20	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	



21	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang dirujuk	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
22	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan makanan	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	24151	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
23	Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
24	Jumlah Tempat Tinggal penampungan pengungsi yang dimiliki	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	19600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	



25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	
27	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang tersedia	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	85%	



TABEL 2. 2.2

Pencapaian Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Persentase penanganan PPKS	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	85%	100%	100%	100%	100%	100%		95%	95%	-
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Nilai SAKIP			75	75	75	80	72,45	-	75	75	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan penanganan PPKS di Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggarakan penanganan PPKS, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan, antara lain:

1. Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
9. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi PPKS.
- 2) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 3) Optimalisasi anggaran pembiayaan dalam mendukung pencapaian pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 4) Optimalisasi sumber daya manusia aparatur bidang pelayanan sosial.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- 1) Memiliki rencana strategis sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 2) Memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Sosial mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu menjadikan Kabupaten Kubu Raya terdepan dan berkualitas.
- 4) Tersedianya dana untuk menunjang program dan kegiatan.

Sementara faktor-faktor di Dinas Sosial yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Dinas Sosial adalah:

- 1) Belum optimalnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis bidang sosial, pelatih dan tenaga teknis lainnya.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Belum optimalnya perencanaan anggaran.
- 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan dan belum optimalnya koordinasi antara bidang yang ada.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselarasi transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kubu Raya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya membutuhkan sinergisitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergisitas itu mutlak diperlukan manakala menilai bahwa alokasi anggaran untuk Dinas Sosial dirasa masih belum bisa mengakomodir semua kegiatan.



TABEL 2. 3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Kubu Raya

Bm							Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cat ata n Pen ting		
							Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja		Tar get	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lo kas i	Indikator Kinerja			Tar get	Kebutuhan Dana (Rp.)
									Indikator	Satu an					Indikator	Satu an			
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	0	0	2				PROGRA M PEMBER DAYAAN SOSIAL	KK R	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Perse ntase	10 0	Rp 60.000.000	PROGRA M PEMBER DAYAAN SOSIAL	KK R	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Perse ntase	10 0	Rp 60.000.000	
1	0	0	2	2	0	3	Pengemba ngan Potensi Sumber Kesejahter aan Sosial Daerah Kabupate n/Kota	KK R	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kegia tan	2	Rp 60.000.000	Pengemba ngan Potensi Sumber Kesejahter aan Sosial Daerah Kabupate n/Kota	KK R	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kegia tan	2	Rp 60.000.000	



1	062203001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	Rp 30.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	Rp 30.000.000	
1	062203004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	Rp 30.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	Rp 30.000.000	
1	063	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	KKR	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase	100	Rp 15.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	KKR	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase	100	Rp 15.000.000	



1	06	03	2	01		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	KK R	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	5	Rp 15.000.000	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	KK R	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	5	Rp 15.000.000	
1	06	03	2	01	0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kel	KK R	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	Rp 15.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kel	KK R	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	Rp 15.000.000	



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	Rp 150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	Rp 150.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	KK R	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	KK R	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	Rp 50.000.000	



1	06	04	2	01	0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	KKR	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	KKR	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 10.000.000	
1	06	04	2	01	0007	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu	KKR	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	10	Rp 5.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu	KKR	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	10	Rp 5.000.000	



							Identitas Anak						Identitas Anak						
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 5.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 5.000.000		
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000		
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000		



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000	
1	0	0	2	0		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	KK R	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	100	Rp 100	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	KK R	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	100	Rp 100	



1	06	04	2	02	0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	KKR	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 60.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	KKR	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 60.000.000	
1	06	04	2	02	0010	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	Rp 60.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	Rp 60.000.000	
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KKR	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase	100	Rp 10.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KKR	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase	100	Rp 10.000.000	



1	0	0	2	0		Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	KK R	Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk	Perse ntase	10 0	Rp 10.000.000	Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	KK R	Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk	Perse ntase	10 0	Rp 10.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar	KK R	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Oran g	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar	KK R	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Oran g	10	Rp 10.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar	KK R	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Oran g	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar	KK R	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Oran g	10	Rp 10.000.000	
1	0	0	2	0		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KK R	Persentase Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial	Perse ntase	10 0	Rp 650.000.000	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KK R	Persentase Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial	Perse ntase	10 0	Rp 650.000.000	



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KK R	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	1000	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KK R	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	1000	Rp 50.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KK R	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	2100	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KK R	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	2100	Rp 50.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KK R	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2000	Rp 550.000.000	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KK R	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2000	Rp 550.000.000	
1	0	0				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	KK R	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	100	Rp 100.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	KK R	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	100	Rp 100.000.000	



1	0	0	2	0		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	KK R	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	208	Rp 50.000.000	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	KK R	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	208	Rp 50.000.000	
1	0	0	2	0	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	208	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	KK R	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	208	Rp 50.000.000	
1	0	0	2	0	2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	KK R	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	2	Rp 50.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	KK R	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	2	Rp 50.000.000	



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	KK R	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	KK R	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 50.000.000	
1	0					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KK R	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	75	Rp 5.145.991.158	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KK R	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	75	Rp 5.145.991.158	
1	0	0	2	0		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	Rp 210.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	Rp 210.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Rp 30.000.000	



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	KK R	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	KK R	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	Rp 30.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	KK R	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	KK R	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	Rp 30.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	KK R	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	1	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	KK R	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	1	Rp 30.000.000	



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	KK R	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	KK R	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	Rp 30.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KK R	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KK R	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	Rp 30.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 30.000.000	
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	43	Rp 3.050.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	43	Rp 3.050.000.000	



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KK R	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	23	Rp 3.000.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KK R	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	23	Rp 3.000.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	KK R	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13 12	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	KK R	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13 12	Rp 30.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KK R	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KK R	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 10.000.000	



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KK R	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KK R	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	17	Rp 10.000.000	
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	8	Rp 15.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	8	Rp 15.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KK R	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Rp 5.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KK R	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Rp 5.000.000	



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KK R	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Rp 5.000.000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KK R	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Rp 5.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KK R	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	Rp 5.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KK R	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	Rp 5.000.000	
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	KK R	Jumlah ASN yang difasilitasi	Dokumen	23	Rp 81.119.850	Kegiatan Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	KK R	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	23	Rp 81.119.850	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KK R	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	Rp 28.334.850	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KK R	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	Rp 28.334.850	



1	0	0	2	0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KK R	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrai Kepegawaian	Dokumen	7	Rp 10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KK R	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrai Kepegawaian	Dokumen	7	Rp 10.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KK R	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	23	Rp 42.785.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KK R	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	23	Rp 42.785.000	
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	Rp 405.380.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Paket pelayanan operasional kantor (Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Paket	12	Rp 405.380.000	
1	0	0	2	0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KK R	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KK R	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 6.000.000	



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KK R	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	17	Rp 110.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KK R	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	17	Rp 110.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KK R	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	Rp 40.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KK R	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	Rp 40.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	KK R	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	365	Rp 4.380.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	KK R	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	365	Rp 4.380.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KK R	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	Rp 200.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KK R	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	Rp 200.000.000	



1	0	0	2	0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KK R	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	300	Rp 5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KK R	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	300	Rp 5.000.000	
1	0	0	2	0	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KK R	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	14	Rp 40.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KK R	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	14	Rp 40.000.000	
1	0	0	2	0		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KK R	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	69	Rp 681.113.397	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KK R	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	69	Rp 681.113.397	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KK R	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	Rp 39.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KK R	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	Rp 39.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan	KK R	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	21	Rp 29.585.411	Sub Kegiatan	KK R	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	21	Rp 29.585.411	



						Pengadaa n mebel						Pengadaa n mebel						
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	KK R	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	44	Rp 414.397.98 6	Sub Kegiatan Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	KK R	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	44	Rp 414.397.986	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaa n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KK R	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Rp 198.150.00 0	Sub Kegiatan Pengadaa n Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KK R	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Rp 198.150.000	
1	0	0	2	0		Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	KK R	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lapo ran	37	Rp 540.000.00 0	Kegiatan Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	KK R	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lapo ran	37	Rp 540.000.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaa n jasa komunika si, sumber daya air dan listrik	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo ran	24	Rp 60.000.000	Sub Kegiatan Penyediaa n jasa komunika si, sumber daya air dan listrik	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapo ran	24	Rp 60.000.000	



1	0	0	2	0	00	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	13	Rp 480.000.00 0	Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapo ran	13	Rp 480.000.000	
1	0	0	2	0	9	Kegiatan Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	KK R	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	61	Rp 163.357.91 1	Kegiatan Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	KK R	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	61	Rp 163.357.911	
1	0	0	2	0	00	Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	KK R	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 29.062.500	Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	KK R	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 29.062.500	



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KK R	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	Rp 75.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KK R	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	Rp 75.000.000	
1	0	0	2	0	00	Pemeliharaan Mebel	KK R	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	21	Rp 29.585.411	Pemeliharaan Mebel	KK R	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	21	Rp 29.585.411	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	KK R	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	Rp 15.310.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	KK R	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	23	Rp 15.310.000	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	KK R	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	Rp 14.400.000	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	KK R	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	Rp 14.400.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kubu Raya, Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah meningkatkan kualitas hidup para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan



Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	
					2025	2026
1	Meningkatnya transparansi akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Transparansi Akuntanbilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP	B (75)	B (75)
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	90%	95%

3.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2026

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pengadaan mebel
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

3.1 Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

4.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

4.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

5.1 Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar

- Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar
- Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar

5.2 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota



- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 6.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- 6.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana



TABEL 3. 2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2026 DAN PERLIRAAN MAJU TAHUN 2027
KABUPATEN KUBU RAYA

Kode						Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Indikator	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 60.000.000	APBD		100	Rp 60.000.000
1	0	0	2	0	3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Kegiatan	KKR	2	Rp 60.000.000	APBD		2	Rp 60.000.000



1	0 6	0 2	2	0 3	000 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	20	Rp 30.000.000	APBD		20	Rp 30.000.000
1	0 6	0 2	2	0 3	000 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	KKR	20	Rp 30.000.000	APBD		20	Rp 30.000.000
1	0 6	0 3				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase	KKR	100	Rp 15.000.000	APBD		100	Rp 15.000.000
1	0 6	0 3	2	0 1		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	KKR	5	Rp 15.000.000	APBD		5	Rp 15.000.000



						Desa/Kelurahan asal									
1	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	5	Rp 15.000.000	APBD		5	Rp 15.000.000
1	0	0				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 440.000.000	APBD		100	Rp 440.000.000



1	06	04	2	01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 320.000.000	APBD		100	Rp 320.000.000
1	06	04	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	5	Rp 50.000.000	APBD		5	Rp 50.000.000
1	06	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	33	Rp 10.000.000	APBD		33	Rp 10.000.000



1	0 6	0 4	2	0 1	000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	33	Rp 150.000.000	APBD		33	Rp 150.000.000
1	0 6	0 4	2	0 1	000 4	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 10.000.000	APBD		10	Rp 10.000.000
1	0 6	0 4	2	0 1	000 5	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual,dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	100	Rp 50.000.000	APBD		100	Rp 50.000.000
1	0 6	0 4	2	0 1	000 6	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik,Mental,Spiritual,dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	50	Rp 10.000.000	APBD		50	Rp 10.000.000



						Pengemis dan Masyarakat									
1	06	04	2	01	0007	Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	KKR	10	Rp 5.000.000	APBD		10	Rp 5.000.000
1	06	04	2	01	0008	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 5.000.000	APBD		10	Rp 5.000.000
1	06	04	2	01	0010	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 10.000.000	APBD		10	Rp 10.000.000



1	0 6	0 4	2	0 1	001 1	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 10.000.000	APBD		10	Rp 10.000.000
1	0 6	0 4	2	0 1	001 2	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 10.000.000	APBD		10	Rp 10.000.000
1	0 6	0 4	2	0 2		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	KKR	100	Rp 100	APBD		100	Rp 100



1	0 6	0 4	2	0 2	000 8	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	50	Rp 60.000.000	APBD		50	Rp 60.000.000
1	0 6	0 4	2	0 2	001 0	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	5	Rp 60.000.000	APBD		5	Rp 60.000.000
1	0 6	0 5				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 10.000.000	APBD		100	Rp 10.000.000
1	0 6	0 5	2	0 1		Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk	Persentase	KKR	100	Rp 10.000.000	APBD		100	Rp 10.000.000



1	0 6	0 5	2	0 1	000 2	Sub Kegiatan Rujukan anak anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Orang	KKR	10	Rp 10.000.000	APBD		10	Rp 10.000.000
1	0 6	0 5	2	0 1	000 3	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Orang	KKR	10	Rp 10.000.000	APBD		10	Rp 10.000.000
1	0 6	0 5	2	0 2		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fakir Miskin yang Menerima Bantuan Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 650.000.000	APBD		100	Rp 650.000.000
1	0 6	0 5	2	0 2	000 1	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	KKR	10000	Rp 50.000.000	APBD		10000	Rp 50.000.000
1	0 6	0 5	2	0 2	000 2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	KKR	21000	Rp 50.000.000	APBD		21000	Rp 50.000.000



1	0 6	0 5	2	0 2	000 3	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	KKR	20000	Rp 550.000.000	APBD		20000	Rp 550.000.000
1	0 6	0 6				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 100.000.000	APBD		100	Rp 100.000.000
1	0 6	0 6	2	0 1		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	KKR	208	Rp 50.000.000	APBD		208	Rp 50.000.000
1	0 6	0 6	2	0 1	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	208	Rp 50.000.000	APBD		208	Rp 50.000.000



1	0	0	2	0		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	KKR	2	Rp 50.000.000	APBD		2	Rp 50.000.000
1	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	50	Rp 50.000.000	APBD		50	Rp 50.000.000
1	0					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	KKR	75	Rp5.145.991.158	APBD		75	Rp5.145.991.158
1	0	0	2	0		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	KKR	13	Rp 210.000.000	APBD		13	Rp 210.000.000
1	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	KKR	2	Rp 30.000.000	APBD		2	Rp 30.000.000



						Perangkat Daerah									
1	06	01	2	01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	KKR	1	Rp 30.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000
1	06	01	2	01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	KKR	1	Rp 30.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000
1	06	01	2	01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	KKR	1	Rp 30.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000
1	06	01	2	01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	KKR		Rp 30.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000



1	0 6	0 1	2	0 1	000 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	KKR	5	Rp 30.000.000	APBD		5	Rp 30.000.000
1	0 6	0 1	2	0 1	000 7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	KKR	1	Rp 30.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000
1	0 6	0 1	2	0 2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	KKR	43	Rp3.050.000. 000	APBD		43	Rp3.050.000. 000
1	0 6	0 1	2	0 2	000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	KKR	27	Rp3.300.000. 000	APBD		27	Rp3.300.000. 000
1	0 6	0 1	2	0 2	000 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	KKR	1312	Rp 30.000.000	APBD		1312	Rp 30.000.000



1	06	01	2	02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	KKR	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000
1	06	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	KKR	17	Rp 10.000.000	APBD		17	Rp 10.000.000
1	06	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	KKR	8	Rp 15.000.000	APBD		8	Rp 15.000.000
1	06	01	2	03	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	KKR	2	Rp 5.000.000	APBD		2	Rp 5.000.000



1	06	01	2	03	0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	KKR	1	Rp 5.000.000	APBD		1	Rp 5.000.000
1	06	01	2	03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	KKR	5	Rp 5.000.000	APBD		5	Rp 5.000.000
1	06	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang di Fasilitas	Dokumen	KKR	23	Rp 81.119.850	APBD		23	Rp 81.119.850
1	06	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	KKR	1	Rp 28.334.850	APBD		1	Rp 28.334.850
1	06	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	KKR	7	Rp 10.000.000	APBD		7	Rp 10.000.000
1	06	01	2	05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	KKR	27	Rp 60.000.000	APBD		27	Rp 60.000.000



1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	KKR	12	Rp 405.380.000	APBD		12	Rp 405.380.000
1	0	0	2	0	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	KKR	1	Rp 6.000.000	APBD		1	Rp 6.000.000
1	0	0	2	0	000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	KKR	17	Rp 110.000.000	APBD		17	Rp 110.000.000
1	0	0	2	0	000 5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	KKR	5	Rp 40.000.000	APBD		5	Rp 40.000.000
1	0	0	2	0	000 6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	KKR	365	Rp 4.380.000	APBD		365	Rp 4.380.000
1	0	0	2	0	000 9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	KKR	250	Rp 200.000.000	APBD		250	Rp 200.000.000



1	0	0	2	0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	KKR	300	Rp 5.000.000	APBD		300	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	KKR	14	Rp 40.000.000	APBD		14	Rp 40.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	KKR	69	Rp 681.113.397	APBD		69	Rp 681.113.397
1	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	KKR	1	Rp 39.000.000	APBD		1	Rp 39.000.000
1	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	KKR	21	Rp 29.585.411	APBD		21	Rp 29.585.411
1	0	0	2	0	000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	KKR	44	Rp 414.397.986	APBD		44	Rp 414.397.986



1	0	0	2	0	001	0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	KKR	3	Rp 198.150.000	APBD		3	Rp 198.150.000
1	0	0	2	0			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	KKR	37	Rp 540.000.000	APBD		37	Rp 540.000.000
1	0	0	2	0	000	2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	KKR	24	Rp 60.000.000	APBD		24	Rp 60.000.000
1	0	0	2	0	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	KKR	13	Rp 480.000.000	APBD		13	Rp 480.000.000
1	0	0	2	0			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	KKR	61	Rp 163.357.911	APBD		61	Rp 163.357.911



1	0 6	0 1	2	0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	KKR	1	Rp 29.062.500	APBD		1	Rp 29.062.500
1	0 6	0 1	2	0 9	000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	KKR	15	Rp 75.000.000	APBD		15	Rp 75.000.000
1	0 6	0 1	2	0 9	000 6	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	KKR	21	Rp 29.585.411	APBD		21	Rp 29.585.411
1	0 6	0 1	2	0 9	000 8	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	KKR	23	Rp 15.310.000	APBD		23	Rp 15.310.000
1	0 6	0 1	2	0 9	001 0	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	KKR	1	Rp 14.400.000	APBD		1	Rp 14.400.000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

TABEL 4. 1

ALOKASI ANGGARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2026

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 60.000.000
1	06	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 60.000.000
1	06	02	2	03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 30.000.000
1	06	02	2	03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 30.000.000
1	06	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp 15.000.000
1	06	03	2	01		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Rp 15.000.000
1	06	03	2	01	0001	Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp 15.000.000
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 440.000.000
1	06	04	2	01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 320.000.000



1	06	04	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp	50.000.000
1	06	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp	10.000.000
1	06	04	2	01	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp	150.000.000
1	06	04	2	01	0004	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	Rp	10.000.000
1	06	04	2	01	0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp	50.000.000
1	06	04	2	01	0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp	10.000.000
1	06	04	2	01	0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp	5.000.000
1	06	04	2	01	0008	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp	5.000.000
1	06	04	2	01	0010	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp	10.000.000
1	06	04	2	01	0011	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp	10.000.000
1	06	04	2	01	0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Rp	10.000.000
1	06	04	2	02		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Rp	100
1	06	04	2	02	0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp	60.000.000
1	06	04	2	02	0010	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp	60.000.000
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	10.000.000
1	06	05	2	01		Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	Rp	10.000.000
1	06	05	2	01	0002	Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar	Rp	10.000.000



1	06	05	2	01	0003	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak anak terlantar	Rp	10.000.000
1	06	05	2	02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	650.000.000
1	06	05	2	02	0001	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	50.000.000
1	06	05	2	02	0002	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	50.000.000
1	06	05	2	02	0003	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp	550.000.000
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp	100.000.000
1	06	06	2	01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp	50.000.000
1	06	06	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Rp	50.000.000
1	06	06	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp	50.000.000
1	06	06	2	02	0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp	50.000.000
1	06					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp	5.145.991.158
1	06	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	210.000.000
1	06	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp	30.000.000
1	06	01	2	01	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp	30.000.000
1	06	01	2	01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp	30.000.000
1	06	01	2	01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp	30.000.000
1	06	01	2	01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp	30.000.000
1	06	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	30.000.000



1	06	01	2	01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	30.000.000
1	06	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.050.000.000
1	06	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	3.000.000.000
1	06	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp	30.000.000
1	06	01	2	02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	10.000.000
1	06	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	10.000.000
1	06	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	15.000.000
1	06	01	2	03	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	5.000.000
1	06	01	2	03	0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	5.000.000
1	06	01	2	03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	5.000.000
1	06	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	81.119.850
1	06	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	28.334.850
1	06	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	10.000.000
1	06	01	2	05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	42.785.000
1	06	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	405.380.000
1	06	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp	6.000.000
1	06	01	2	06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	110.000.000
1	06	01	2	06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp	40.000.000
1	06	01	2	06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp	4.380.000



1	06	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	200.000.000
1	06	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp	5.000.000
1	06	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp	40.000.000
1	06	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	681.113.397
1	06	01	2	07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	39.000.000
1	06	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Rp	29.585.411
1	06	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	414.397.986
1	06	01	2	07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	198.150.000
1	06	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	540.000.000
1	06	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp	60.000.000
1	06	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	480.000.000
1	06	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	163.357.911
1	06	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	29.062.500
1	06	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	75.000.000
1	06	01	2	09	0006	Pemeliharaan Mebel	Rp	29.585.411
1	06	01	2	09	0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp	15.310.000
1	06	01	2	09	0010	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp	14.400.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2026. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya

Substansi Renja Dinas Sosial disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu di perhatikan, antara lain :

1. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Dinas Sosial pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip *Service Excellent*, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Alokasi APBD Kabupaten Kubu Raya untuk Dinas Sosial selama ini dirasa belum dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat, hal ini di karenakan luasnya wilayah Kabupaten Kubu Raya.
3. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.
4. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Dinas Sosial, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.



Kami berharap, bahwa Rencanan Kerja Dinas Sosial ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan Sosial dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian dokumen Rencanan Kerja Dinas Sosial ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya,

2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**



Wasilun, S.Ag.,M.Pd
NIP.196708081999031010